KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Minta Rp 500 Miliar untuk Kelanjutan Proyek Gedung
Tanggal : Minggu, 13 Agustus 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5

DPR Minta Rp 500 Miliar untuk Kelanjutan Proyek Gedung

TEMPO/TONY HARTAWAN

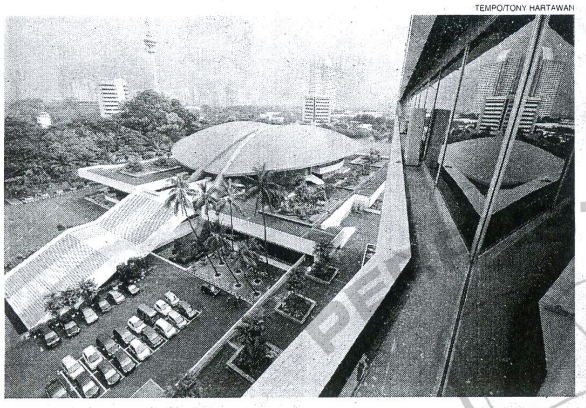

Gedung MPR/DPR di Senayan, Kompleks Parlemen, Jakarta, 2013.

Minim Hasil, Minta Anggaran Lebih

TIAP tahun, Dewan Perwakilan Rakyat selalu mendapatkan kenaikan anggaran. Tapi bertambahnya dana itu tidak diiringi kinerja kinclong dalam menjalankan tugas utama: menghasilkan undang-undang.

ANGGARAN DPR (TRILIUN RUPIAH)

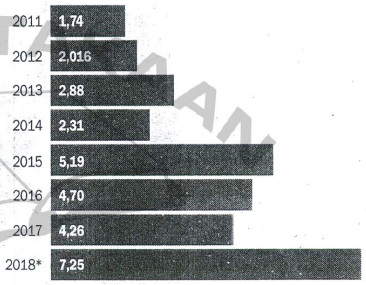

* USUL

PENCAPAIAN LEGISLASI

▼ **2011**
Anggaran legislasi DPR:
Rp 301,7 miliar
Dari 91 RUU prioritas, hanya 18 yang disahkan.

▼ **2012**
Anggaran legislasi DPR:
Rp 501,2 miliar
Dari 69 RUU prioritas, hanya 10 yang disahkan.

▼ **2013**
Anggaran legislasi DPR:
Rp 473,9 miliar
Dari 75 RUU prioritas, hanya 7 yang disahkan.

▼ **2014**
Anggaran legislasi:
Rp 339,1 miliar
Dari 68 RUU prioritas, hanya 3 yang disahkan.

▼ **2015**
Anggaran legislasi:
Rp 430,5 miliar
Dari 37 RUU prioritas, hanya 3 yang disahkan.

▼ **2016**
Anggaran legislasi:
Rp 309,4 miliar
Dari 50 RUU prioritas, hanya 10 yang disahkan.

▼ **2017**
Anggaran legislasi:
Rp 116,8 miliar
Dari 50 RUU prioritas, hanya 4 yang disahkan (per Juli).

SUMBER: IBC DAN FITRA
TEKS: HUSSEIN ABRI DONGORAN

Kinerja DPR selama ini buruk.

Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat tetap meneruskan proyek pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen, Jakarta. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan lembaganya meminta pemerintah menambah anggaran Rp 500 miliar untuk kelanjutan pengerjaan proyek tersebut. "Angka itu masuk dalam porsi Rp 5,7 triliun untuk anggaran DPR pada 2018," ujar dia di kantornya, kemarin.

Semula, DPR meminta anggaran Rp 7,25 triliun, atau naik sekitar 70 persen dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 4,2 triliun. Menurut Fahri, setelah berkonsultasi dengan pemerintah, ada revisi jumlah anggaran yang DPR minta, yakni menjadi Rp 5,7 triliun. Dana Rp 5,7 triliun itu akan dibahas DPR bersama pemerintah setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada 16 Agustus mendatang. Jika disetujui, hal itu akan masuk dalam anggaran 2018.

DPR sebetulnya sudah mendapatkan fulus Rp 564 miliar pada 2016 untuk pengerjaan proyek serupa. Dana itu merupakan sebagian dari total anggaran tahun jamak proyek yang mencapai Rp 1,6 triliun. Duit itu akan digunakan untuk membiayai tujuh pengerjaan, seperti alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, *visitor center*, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal anggota Dewan.

Menurut Fahri, yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi dan Modernisasi DPR, proyek gedung tersebut juga masuk dalam program prioritas karena dia menilai kondisi gedung DPR saat ini sudah tidak layak. Misalnya, bertambahnya jumlah staf anggota DPR menjadi tujuh orang per anggota, dari semula dua orang. Jumlah anggota Dewan juga bertambah dari 560 menjadi 575 pada 2019. Penambahan kursi Dewan itu masuk dalam UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru disahkan pada 21 Juli lalu. "Pengerjaan proyek ada kemungkinan akan dimulai pada 2018," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan, dalam tujuh pengerjaan proyek itu juga muncul usul pembangunan apartemen untuk anggota Dewan. Kebutuhan tempat baru itu, ujar dia, lantaran tempat tinggal anggota DPR selama ini—di Kalibata dan Ulujami—dinilai tidak efektif. "Apartemen juga akan dibicarakan dalam pembahasan anggaran nanti," ujarnya.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Irma Suryani Chaniago, mengatakan masalah apartemen dan keberlanjutan gedung memang sempat dibahas. Menurut dia, kalau terlaksana, pembangunan harus dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Agar tidak ada *cawe-cawe* dan dituding proyek ini mainan DPR," ujarnya.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan DPR seharusnya malu terhadap keinginan mereka menambah anggaran, apalagi untuk pembangunan gedung. "Keuangan negara sedang sulit. DPR juga sering melakukan penyimpangan anggaran, seperti dalam kasus *e-KTP*," ujarnya. "Jangan-jangan dana akan diselewengkan untuk Pemilu 2019."

Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsuddin Alimsyah, mengatakan lebih baik DPR berkonsentrasi meningkatkan kinerjanya di bidang legislatif dan mengurusi rakyat dibanding hanya mengurusi anggaran mereka sendiri. "Selama ini kinerja mereka juga buruk," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali irit bicara ihwal wacana Dewan meminta tambahan anggaran dan keberlanjutan pembangunan gedung DPR. "Nanti saja," ujarnya. Sebelumnya, Sri mengatakan akan membahas usul belanja negara seusai pembacaan nota keuangan oleh Presiden. ● ARKHELAUS WISNU | ANDRI EL FARUQI | ANDI IBNU